BABI

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hingga tahun 2016, laju pertumbuhan penduduk Indonesia adalah sebesar 1,49% atau setara dengan empat juta orang per tahun (BKKBN, 2017). Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (2015) jumlah penduduk Indonesia pada 2019 diproyeksikan mencapai 267 juta jiwa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Proinsi Jawa Barat (2017), Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yaitu 46,8 juta jiwa, disusul oleh Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Jumlah penduduk tertinggi di Jawa Barat adalah Kabupaten Bogor, yaitu sebesar 5.715.009 jiwa (Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2019). Kabupaten Bogor juga menjadi kabupaten dengan Pasangan Usia Subur (PUS) paling banyak di Jawa Barat yang tidak menggunakan alat kontrasepsi yang merupakan bagian dari program Keluarga Berencana yang ditujukan untuk mengatur kelahiran. Salah satu desa di Kabupaten Bogor yang masih tinggi jumlah penduduknya dan tidak menggunakan alat kontrasepsi adalah Desa Tajurhalang dengan jumlah penduduk di tahun 2017 sebesar 22.465 jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2019;BPS Kecamatan Bogor, 2018).

Peningkatan jumlah penduduk yang cepat dapat menyebabkan berbagai dampak seperti, alih fungsi lahan/hutan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan perumahan, dan industri yang mengakibatkan terjadi eksploitasi alam dan lingkungan yang bisa menyebabkan penggundulan hutan (pembukaan lahan secara serampangan, *illegal logging*), kurangnya penyerapan air, tanah longsor dan banjir. Limbah rumah tangga dan industri yang semakin banyak berpengaruh terhadap pencemaran lingkungan. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang berkurang, persaingan dunia kerja,

dan pemukiman penduduk yang semakin meningkat juga menyebabkan tingginya angka kriminalitas (Pancasasti, 2018).

Pengendalian laju pertambahan jumlah penduduk perlu dilakukan agar tidak terjadi ledakan penduduk (Septalia & Puspitasari, 2015). Dikuatkan dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yangmana salah satu programnya adalah melaksanakan program KB (Tatuhe et al., 2015). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) beserta mitra kerjanya telah membentuk Kampung KB sejak tahun 2016, dan sekarang sedang memprioritaskan Program Kampung Keluarga Berencana di Tahun 2019 di setiap desa sangat tertinggal (BKKBN, 2017).

Sasaran program KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang lebih dikhususkan pada kelompok Wanita Usia Subur (WUS) yang berada pada kisaran usia 15-49 tahun (Hardhana et al., 2017). Pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Indonesia telah mengukir sejarah keberhasilan dalam menurunkan laju pertumbuhan penduduk dari 2,31 persen selama periode 1971-1980, menjadi 1,49 % periode 2000-2010 dan 1,36 persen selama periode 2010-2016. Penurunan laju pertumbuhan penduduk ini, konsisten dengan penurunan angka kelahiran total (atau TFR) dari 5,61 anak per wanita usia subur pada tahun 1971 diperkirakan menjadi 2,38 pada tahun 2018 (Data RI, 2013).

Meskipun pelayanan KB sudah digalakkan oleh pemerintah Indonesia, tetap saja laju pertumbuhan penduduk Indonesia masih tinggi. Salah satu faktor penyebabnya adalah pemilihan metode kontrasepsi yang tidak tepat. Dalam kenyataannya, banyak kesulitan yang dialami para wanita dalam menentukan alat kontrasepsi yang sesuai untuk dirinya (Affandi, 2014). Terdapat banyak faktor yang memengaruhi seseorang dalam pemilihan kontrasepsi yang akan digunakan. Faktor yang menjadi pertimbangan seseorang dalam memilih alat kontrasepsi antara lain faktor individu, faktor kesehatan, dan faktor metode kontrasepsi seperti biaya, dan efek samping (Hartanto, 2002).

Metode kontrasepsi yang banyak digunakan di Indonesia adalah non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (non MKJP). Tingginya angka pencapaian tersebut dikarenakan metode kontrasepsi relatif murah, sedangkan biaya untuk pemasangan pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cenderung lebih mahal. Sehingga memberikan kontribusi besar pada kegagalan program pengendalian pertumbuhan penduduk (Septalia & Puspitasari, 2015). Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya faktor yang mempengaruhi pemilihan metode kontrasepsi tersebut adalah sikap (Setiasih, Widjanarko, & Istiarti, 2016), biaya pemakaian kontrasepsi dan biaya non materiil (pengalaman efek samping) (Septalia & Puspitasari, 2015), jumlah anak yang lahir hidup (Fitrianingsih & Melaniani, 2015), serta tingkat pendidikan ibu (Farid & Gosal, 2017).

Oleh sebab itu, berdasarkan persentase data-data tersebut di atas, penulis tertarik melakukan pengkajian untuk menganalisis faktor faktor yang berhubungan dengan pemilihan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) pada Wanita Usia Subur (WUS) di Desa Tajur Halang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

I.2 Rumusan Masalah

Apa sajakah faktor-faktor yang berhubungan dengan pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada Wanita Usia Subur (WUS) di Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.

I.3 Tujuan Penelitian

I.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada Wanita Usia Subur (WUS) di Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.

I.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran karakteristik Wanita Usia Subur (WUS) berdasarkan metode kontrasepsi di Desa Tajurhalang.
- b. Mengetahui jumlah Wanita Usia Subur (WUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan non-MKJP.
- c. Mengetahui sikap yang mempengaruhi Wanita Usia Subur (WUS) dalam memilih metode kontrasepsi di Desa Tajurhalang.
- d. Mengetahui hubungan faktor demografi, sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku terhadap pemilihan metode kontrasepsi di Desa Tajur halang.
- e. Mengetahui faktor yang dominan mempengaruhi Wanita Usia Subur (WUS) dalam memilih metode kontrasepsi di Desa Tajurhalang.

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang yang berhubungan dengan pemilihan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) pada Wanita Usia Subur (WUS) di Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

I.4.2 Manfaat Praktis

a. Posyandu

Memberikan informasi kepada Posyandu di Desa Tajurhalang untuk dapat menyediakan kontrasepsi yang banyak dipilih oleh masyarakat di desa tersebut.

b. Institusi Pendidikan

Menambah informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa lainnya agar dapat mengembangkan pengetahuan untuk penelitian selanjutnya.

c. Penulis

Menjadi pembelajaran bagi penulis untuk dapat mengetahui faktor yang berperan penting dalam memilih metode kontrasepsi sehingga dapat lebih efektif dalam menjalankan program KB dikemudian hari.